

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 188.45/ 263 /406.001.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Lampiran Peraturan
 Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
 Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka
 kelancaran pelaksanaan sistem pemerintah berbasis
 elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
 Trenggalek perlu dibentuk tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang : 1. Mengingat Daerah-daerah Kabupaten dalam Pembentukan lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Paraf Koordinasi	1
Sri Agustiani, S.H.	//

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 2014 Nomor 244, Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 9 Tahun 2015tentang Nomor Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Paraf Koordinasi		
Sri Agustiani, S.H.	//	

- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 9. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 2016 Nomor 16. Tambahan Trenggalek Tahun Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
- 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 60 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

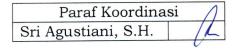
- a. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
 Trenggalek.

KETIGA

: Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Trenggalek dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021.



KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 14 April 2021

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Paraf Koordinasi

Sri Agustiani, S.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 188.45/ 203 /406.001.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Pembina	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
II.	Ketua	1. Ir. JOKO IRIANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah
		2. ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	Asisten Administrasi Umum
III.	Sekretaris	1. EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. YULI PRIYANTO, S.Sos.,M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
IV.	Anggota	1. MUDIONO, S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Plt. Kepala Bidang e-Government dan Statistik
V.	Anggota	1. MUDIONO, S.Sos.	Plt. Kepala Bidang e-Government
			dan Statistik
		2. MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris DPRD
		3. Ir. YUDI SUNARKO, M.Si.	Plt. Inspektur
		4. SUDARSONO, S.E.,M.Si.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5. AGUS YAHYA, SE.,M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah
		6. Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		7. dr. SAERONI, M.MRS.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8. RAMELAN, ATD.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paraf Koordinasi		
Sri Agustiani, S.H.	ld	

9. Ir. MUYONO PIRANATA	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
10. Dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
12. Drs. AGOES SETIYONO	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
13. Ir. DIDIK SUSANTO	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
14. SUPRAPTI, S.Si.,M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Drs. EDY SOEPRIYANTO	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
16. SIGID AGUS HARI BASOEKI, S.H.,M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan
17. Drs. AGOES SETIYONO	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
18. Ir. MULYAHANDAKA	Kepala Dinas Penanaman Moda dan PTSP
19. Drs. CATUR BUDI PRASETYO	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20. Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si.	Kepala Dinas Perikanan
21. Drs. SUNYOTO	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22. Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
23. dr. SUNARTO	Direktur RSUD
24. Drs. DJOKO RUSIANTO, M.Si.	Kepala BPBD
25. Drs. HABIB SOLEHUDIN	Plt. Kepala Kesbangpol
26. SRI AGUSTIANI, S.H.	Plt. Kepala Bagian Organisasi Setda
27. SRI AGUSTIANI, S.H.	Kepala Bagian Hukum Setda

28. Drs. KIKI WAHYU REZEKI	Camat Trenggalek
29. DILLY DWI KURNIASARI, S.STP.,M.AP.	Camat Pogalan
30. AHMAD ZUHDAN, S.STP.,M.Si.	Camat Durenan
31. EDI SANTOSO, S.STP., M.Si.	Camat Watulimo
32. RUDIYANTO, S.Sos., M.Si.	Camat Munjungan
33. Dra. HASNAWATI	Camat Kampak
34. Drs. SAMELAN	Camat Gandusari
35. SHOLIKHIN, S.IP.,M.Si.	Camat Karangan
36. DWI RATNA WIDYAWATI, AP., M.M.	Camat Suruh
37. TEGUH SRI MULYANTO S.Sos.,M.Si.	Camat Dongko
38. Ir. MULYONO, M.H.	Camat Pule
39. AGUS DWI KARYANTO, S.STP.	Camat Panggul
40. Drs. BUDIANTO	Camat Tugu
41. NURKOLIK, S.STP.	Camat Bendungan
42. IWAN KUKUH ARIFFIANTO, S.Sos.,M.P.A.	Kepala Bidang IATIK
43. MUDIONO, S.Sos.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
44. DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kasi Penyelenggaraan e- Government
45. IKHSANUDIN, S.H.	Kasi Data dan Statistik
46. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Kasi Pengembangan SDTIK
47. RIZKA AMELIYA	Fungsional Umum
48. HAPSARI CIPTANINGTYAS, S.Kom.	Fungsional Umum
49. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom.	Fungsional Umum

	50. ALIFAH NUR SUCIANI, S.Kom.	Fungsional Umum	
,	51. YUDHA ARDHA SENA, S.Sn.	Fungsional Umum	

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN